

**Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus
Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten
Sidenreng Rappang**

***Communication in Public Policy Implementation: A Case Study of Digital
Population Identity (IKD) Socialization in Sidenreng Rappang Regency***

Rezky Ahmadi¹, Erfina², Muhammad Arisal Asad³, Sapri⁴, Herman Dema⁵

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang^{1,2,3,4,5}

Jl. Angkatan 45 No. 1 A Lt., Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: rezkyahmadi25015@pps.umsrappang.ac.id¹

Naskah diterima tanggal 19 Maret 2025. Naskah direvisi tanggal 16 November 2025.

Naskah disetujui tanggal 30 Desember 2025

Abstrak

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan mendukung transformasi digital pelayanan publik. Namun, implementasinya di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi tantangan yang signifikan, ditandai dengan tingkat adopsi yang rendah akibat keterbatasan akses informasi, pemahaman masyarakat yang minim, serta ketidakkonsistenan dalam sosialisasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi komunikasi kebijakan dalam sosialisasi IKD dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III yang menekankan tiga dimensi komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi masih terbatas karena ketergantungan pada media sosial dan kurangnya pendekatan langsung ke masyarakat. Kejelasan informasi juga menjadi kendala sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami manfaat, prosedur aktivasi, dan kegunaan IKD dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, inkonsistensi dalam sosialisasi kebijakan menyebabkan disparitas informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga menghambat penerimaan masyarakat. Studi ini merekomendasikan strategi optimalisasi komunikasi kebijakan dengan memperluas cakupan sosialisasi melalui pendekatan multi-kanal yang lebih inklusif, menyederhanakan bahasa komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan, Transmisi Informasi

Abstract

Digital Population Identity (IKD) is a strategic government innovation aimed at improving the efficiency of population administration and supporting the digital transformation of public services. However, its implementation in Sidenreng Rappang Regency still faces significant challenges, marked by a low adoption rate due to limited access to information, minimal public understanding, and inconsistency in policy socialization. This study aims to analyze the implementation of policy communication in IKD socialization using George C. Edwards III's policy implementation theory, which emphasizes three dimensions of communication: transmission, clarity, and consistency. This research was conducted using a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The results show that information transmission is still limited due to a reliance on social media and a lack of direct approaches to the community. Information clarity is also an obstacle, as the public often lacks an understanding of the benefits, activation procedures, and usefulness of IKD in daily life. In addition, inconsistencies in policy socialization led to information disparities between urban and rural areas, hindering community acceptance. This study suggests optimizing policy communication by broadening multi-channel outreach, using clearer language for all groups, and enhancing agency coordination to improve IKD implementation in Sidenreng Rappang Regency.

Keywords: Policy Communication, Digital Population Identity, Policy Implementation, Information Transmission

PENDAHULUAN

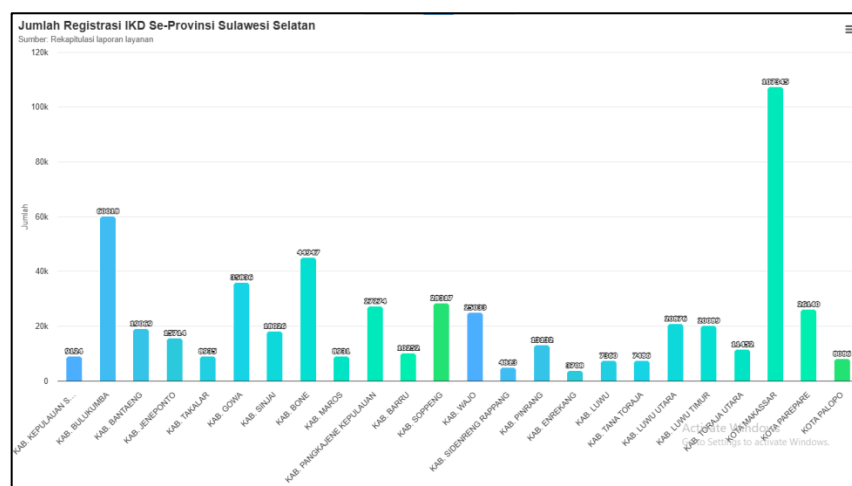
Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi kependudukan ([Nuraeni & Syahrudin, 2024](#)). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dan didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital. Dengan adanya IKD, masyarakat diharapkan dapat mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik (KTP-el), kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya secara digital melalui perangkat seluler yang sejalan dengan program pemerintah menuju birokrasi digital yang lebih responsif dan transparan ([Nastia, 2024](#)).

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, teori George C. Edwards III, 1980 (dalam [Jumroh & Pratama, 2021](#)) menekankan bahwa komunikasi merupakan salah satu dari empat variabel kritis yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, bersama dengan sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini secara khusus menekankan tiga aspek penting dalam komunikasi kebijakan: transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Transmisi berkaitan dengan bagaimana kebijakan

dikomunikasikan kepada implementor dan kelompok sasaran. Kejelasan merujuk pada sejauh mana kebijakan dapat dipahami dengan mudah oleh pihak yang terlibat. Konsistensi mengacu pada keselarasan pesan yang disampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Ketiga dimensi komunikasi ini saling berkaitan dan sama-sama penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik seperti IKD.

Untuk memahami sejauh mana implementasi identitas kependudukan digital berjalan di Sulawesi Selatan, diperlukan gambaran kuantitatif mengenai tingkat registrasi di setiap kabupaten/kota. Data pada Diagram 1 menjadi dasar penting untuk melihat daerah mana yang menunjukkan progres signifikan dan mana yang masih memerlukan optimalisasi komunikasi kebijakan. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat menilai efektivitas sosialisasi IKD di berbagai wilayah sekaligus menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyebaran informasi serta penerimaan masyarakat.

Diagram 1. Jumlah Registrasi IKD Sulsel



Sumber: Laman Disdukcapil Sulsel (2024)

Berdasarkan grafik registrasi IKD di Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat ketimpangan capaian antarwilayah yang cukup signifikan. Beberapa daerah, khususnya perkotaan dan kabupaten dengan akses teknologi yang baik, menunjukkan angka registrasi tinggi, seperti Kota Makassar (107.345), Kabupaten Bulukumba (60.018), dan Kabupaten Bone (44.947). Sebaliknya, sejumlah daerah lain masih mencatat capaian yang rendah, antara lain Kabupaten Takalar, Maros, Pinrang, Sidrap, Luwu, Tana Toraja dan Enrekang yang mengindikasikan perlunya penguatan sosialisasi dan layanan IKD.

Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa daerah perkotaan dan kabupaten dengan akses teknologi lebih baik cenderung memiliki capaian registrasi IKD

yang lebih tinggi. Sementara itu, beberapa daerah dengan kondisi geografis yang lebih menantang atau minim fasilitas digital masih menunjukkan angka rendah, menandakan perlunya strategi komunikasi dan pelayanan yang lebih intensif.

Capaian 4.813 registrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang mengindikasikan bahwa proses sosialisasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan, tetapi masih memiliki ruang peningkatan. Data ini dapat menjadi pijakan untuk mengevaluasi sejauh mana transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi komunikasi kebijakan telah diterapkan oleh instansi terkait.

Dalam implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang, ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan, sebagaimana dikonseptualisasikan di tahun 1980 oleh Edwards III, belum optimal. Hasil observasi awal dan wawancara dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menunjukkan bahwa proses transmisi informasi terkait IKD masih terbatas pada wilayah perkotaan, sementara sebagian besar penduduk Kabupaten Sidrap tinggal di wilayah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi digital. Aspek kejelasan informasi juga menjadi permasalahan, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami manfaat dan fungsi IKD. Sementara itu, aspek konsistensi juga menjadi tantangan karena sosialisasi terkait IKD belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Edwards III (dalam [Jumroh & Pratama, 2021](#)) mengemukakan bahwa kegagalan dalam menerapkan ketiga dimensi komunikasi kebijakan dapat menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Dalam konteks IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang, fenomena ini terlihat dari rendahnya tingkat adopsi. Studi Nurmandi dan Purnomo (2020) menemukan bahwa aspek kejelasan informasi memiliki korelasi paling kuat dengan tingkat keberhasilan implementasi, diikuti oleh konsistensi dan transmisi.

Selain itu, media yang digunakan dalam transmisi informasi IKD juga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat. Edwards III (dalam [Posangi et al., 2022](#)) menekankan bahwa transmisi informasi harus mempertimbangkan karakteristik penerima pesan dan saluran komunikasi yang digunakan. Penelitian Rimardi *et al.* (2022) yang mengaplikasikan konsep transmisi Edwards III menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan *platform* digital dapat meningkatkan efektivitas transmisi informasi dalam implementasi kebijakan publik lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Namun, di

wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap internet seperti sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, metode transmisi konvensional seperti sosialisasi langsung dan pemasangan spanduk masih sangat diperlukan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi [Illahi et al. \(2025\)](#) yang menemukan bahwa di daerah dengan penetrasi internet rendah, efektivitas komunikasi tatap muka dalam mendukung kejelasan informasi 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan komunikasi digital.

Tantangan lain dalam komunikasi kebijakan adalah adanya resistensi dari masyarakat yang dapat dikaitkan dengan kegagalan dalam memenuhi dimensi kejelasan informasi. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa 58% warga masih merasa nyaman dengan sistem administrasi konvensional dan belum melihat urgensi dalam mengadopsi IKD. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kejelasan informasi mengenai manfaat IKD belum tersampaikan dengan baik. Studi yang dilakukan oleh [Kairupan & Pangkey \(2024\)](#) tentang resistensi masyarakat terhadap kebijakan digital menunjukkan bahwa kejelasan informasi dan konsistensi pesan secara signifikan memengaruhi sikap masyarakat terhadap kebijakan baru.

Berdasarkan berbagai persoalan dan fenomena implementasi IKD di Kabupaten Sidrap yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas komunikasi kebijakan dalam proses sosialisasi IKD dengan menggunakan model komunikasi Edwards III yang menekankan tiga dimensi kunci, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana alur informasi mengenai IKD disampaikan kepada masyarakat, sejauh mana pesan kebijakan mampu dipahami dan diterima, serta bagaimana keseragaman informasi dapat dijaga oleh para pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Kehadiran penelitian ini penting mengingat implementasi IKD tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan secara efektif, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan strategi komunikasi kebijakan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan tingkat adopsi dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan IKD secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kaitan yang erat dengan sejumlah penelitian terdahulu yang berfokus pada implementasi IKD. Namun, umumnya penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknis, keamanan, serta regulasi dalam konteks wilayah perkotaan. Penelitian [Putri et al. \(2025\)](#) menegaskan bahwa implementasi IKD di kota-kota

besar menghadapi tantangan utama pada integrasi sistem, keamanan data, serta konsistensi regulasi lintas layanan. Namun, penelitian tersebut tidak menyoroti bagaimana komunikasi kebijakan dapat memengaruhi tingkat penerimaan publik. Penelitian [Syafitri et al. \(2025\)](#) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKD bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan standar keamanan informasi, tetapi mereka belum mengulas bagaimana pesan kebijakan tentang keamanan data disampaikan sehingga menumbuhkan rasa percaya masyarakat. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting bagi pengembangan IKD, tetapi belum menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas komunikasi kebijakan sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi, terlebih dalam konteks wilayah nonperkotaan.

Kesenjangan utama yang muncul dari penelitian-penelitian terdahulu adalah tidak adanya kajian yang secara spesifik menganalisis bagaimana proses komunikasi kebijakan yang mencakup transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi penyampaian berpengaruh terhadap tingkat adopsi IKD di daerah dengan karakteristik sosial pedesaan seperti Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagian besar kajian sebelumnya dilakukan di wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur digital lebih maju, tingkat literasi digital lebih tinggi, serta akses informasi yang lebih merata, sehingga belum mampu menggambarkan tantangan implementasi IKD di daerah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta pola komunikasi masyarakat yang masih sangat bergantung pada interaksi langsung.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menggabungkan model komunikasi kebijakan Edwards III dengan konteks implementasi IKD di wilayah pedesaan. Perspektif penelitian ini belum disentuh secara eksplisit oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan bentuk sosialisasi IKD yang telah dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga menelaah secara kritis bagaimana ketidaktepatan saluran informasi, kurangnya kejelasan pesan, serta inkonsistensi penjelasan antarpetugas berkontribusi terhadap rendahnya tingkat adopsi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menawarkan model strategi komunikasi yang lebih inklusif, mulai dari optimalisasi multichannel komunikasi yang relevan dengan pola interaksi masyarakat pedesaan, pendekatan komunikasi berbasis komunitas lokal, penyederhanaan pesan kebijakan agar lebih mudah dipahami, hingga penguatan koordinasi antarinstansi untuk memastikan uniformitas informasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian komunikasi kebijakan pada

konteks digitalisasi layanan publik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif guna mempercepat keberhasilan implementasi IKD di wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan infrastruktur yang beragam.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

David Easton (dalam [Alhasni et al., 2024](#)) mendefinisikan kebijakan publik sebagai proses distribusi nilai-nilai tertentu yang diterapkan secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat melalui tindakan pemerintah. Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk menciptakan distribusi nilai yang dianggap penting oleh pembuat kebijakan. Menurut Laswell ([dalam Alhasni et al., 2024](#)) kebijakan publik adalah suatu program yang disusun secara terencana untuk mencapai nilai dan sasaran tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat.

Implementasi Kebijakan dan Model Edwards III

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam [Kaendung et al., 2021](#)) implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Model implementasi kebijakan memiliki variasi pendekatan. Smith (dalam [Maharaksa et al., 2025](#)) menekankan alur proses melalui kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan lingkungan. Van Meter dan Van Horn ([dalam Kaendung et al., 2021](#)) memandang implementasi sebagai rangkaian faktor tujuan, karakteristik pelaksana, dan dukungan politik sedangkan Edwards III (dalam [Jumroh & Pratama, 2021](#)) menegaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Kajian tentang peran komunikasi dalam implementasi identitas kependudukan digital dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Edwards III mengembangkan model implementasi kebijakan yang berfokus pada empat variabel kritis yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi atau sikap pelaksana, dan

(4) struktur birokrasi. Model ini menekankan bahwa keempat variabel tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ([Fauzan, 2024](#)).

Edwards III (dalam Fauzan, 2024) menyatakan bahwa "Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan." Dengan demikian, komunikasi merupakan variabel fundamental dalam implementasi kebijakan yang akan memengaruhi tiga variabel lainnya.

Tiga aspek penting dalam variabel komunikasi yang memengaruhi implementasi kebijakan menurut Edwards III, yaitu:

1. Transmisi (*Transmission*)

Proses penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali transmisi komunikasi mengalami distorsi, baik karena pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan, maupun karena kerumitan informasi yang harus disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi.

2. Kejelasan (*Clarity*)

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu. Ketidakjelasan pesan kebijakan akan menimbulkan interpretasi yang salah bahkan bertentangan dengan makna pesan awal.

3. Konsistensi (*Consistency*)

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Identitas Kependudukan Digital

Identitas kependudukan digital merupakan sistem berbasis elektronik yang memfasilitasi akses data kependudukan secara digital serta memungkinkan verifikasi identitas yang aman dan efisien melalui perangkat pintar ([Permadi & Rokhman, 2023](#)). Identitas kependudukan digital adalah transformasi sistem identifikasi penduduk konvensional menuju format digital yang terintegrasi dalam kerangka *e-government* (Sitti Rahmatyah & Elsa, 2024). Transformasi ini sejalan dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi serta kebutuhan akan administrasi kependudukan yang lebih efisien, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat ([Amrih et al., 2024](#)).

Identitas kependudukan digital bertujuan untuk mendukung transformasi digital dalam layanan publik dan swasta dengan menyediakan *platform* yang mempercepat transaksi dan meningkatkan keamanan data. Selain itu, identitas kependudukan digital menawarkan otentikasi kuat untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran informasi ([Sinthawati & Pradana, 2021](#)). Aktivasi identitas kependudukan digital membutuhkan KTP-el, perangkat pintar, surel, dan akses internet, dengan proses aktivasi mencakup pengunduhan aplikasi, pengisian data NIK, serta verifikasi biometrik ([Rahmawati et al., 2024](#)).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis instansi dalam pengelolaan administrasi kependudukan berbasis digital di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini berlangsung selama dua bulan, mulai dari 4 Desember 2024 hingga 4 Februari 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi program identitas kependudukan digital serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dalam kondisi alami. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, karena fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji secara mendalam suatu fenomena spesifik pada suatu konteks tertentu, yaitu proses komunikasi kebijakan dalam sosialisasi identitas kependudukan digital oleh Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kasus yang menjadi fokus studi adalah rendahnya tingkat adopsi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dipengaruhi oleh kendala komunikasi kebijakan pada tiga dimensi utama Edwards III, yaitu transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi penyampaian. Fenomena ini terlihat dari masih terbatasnya jangkauan sosialisasi, minimnya pemahaman masyarakat, serta tidak meratanya penyampaian informasi antarwilayah di kabupaten. Dengan demikian, studi kasus dalam penelitian ini mengacu pada praktik sosialisasi IKD di Disdukcapil, hambatan komunikasi kebijakan di berbagai wilayah, respons, dan pemahaman masyarakat terhadap IKD.

Operasionalisasi studi kasus dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Menentukan batas kasus (*case boundary*)

Penelitian dibatasi pada lokasi Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang, periode penelitian dua bulan, serta aktor-aktor yang terlibat dalam sosialisasi dan penggunaan IKD, yaitu pejabat Disdukcapil, petugas teknis, dan masyarakat.

2. Menetapkan unit analisis

Unit analisis meliputi proses komunikasi kebijakan dalam implementasi IKD yang dikaji melalui tiga dimensi Edwards III: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

3. Mengumpulkan data menggunakan multimetode

Karakter studi kasus menuntut eksplorasi data yang bersumber dari berbagai teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang holistik terhadap suatu fenomena.

4. Melakukan triangulasi

Triangulasi sumber, teknik, dan waktu digunakan untuk memvalidasi konsistensi data. Hal ini penting untuk memastikan reliabilitas temuan, mengingat fenomena komunikasi kebijakan bersifat dinamis.

5. Menganalisis kasus secara menyeluruh

Analisis dilakukan dengan memetakan temuan penelitian ke dalam tiga dimensi komunikasi kebijakan Edwards III sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif tentang faktor yang menghambat ataupun mendukung implementasi IKD di lapangan.

Populasi penelitian mencakup pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat yang telah menggunakan Identitas Kependudukan Digital. Sampel penelitian terdiri dari tujuh informan yang terdiri dari tiga pegawai Dinas Kependudukan dan empat masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang ([Salopah et al., 2024](#)). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Instrumen pengumpulan data yang digunakan mencakup pedoman wawancara, daftar observasi, dan format dokumentasi. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu, (1) tahap persiapan dengan penyusunan instrumen penelitian dan identifikasi informan, (2) tahap pelaksanaan yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta (3) tahap validasi dengan melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan informasi yang diperoleh.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum informasi utama yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ([Bado, 2021](#)). Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melakukan interpretasi mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, serta menguji konsistensi temuan melalui teknik triangulasi sumber dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan IKD di Kabupaten Sidrap. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana tiga dimensi komunikasi kebijakan menurut Edwards III diterapkan dalam proses implementasi IKD di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan strategi optimalisasi komunikasi kebijakan yang dapat diterapkan. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas transmisi informasi, meningkatkan kejelasan penyampaian kebijakan, serta memastikan konsistensi dalam pelaksanaan sosialisasi IKD di Kabupaten Sidrap.

Analisis Implementasi Komunikasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 informan yang terdiri dari 3 pejabat Disdukcapil dan 4 warga masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidrap, ditemukan bahwa komunikasi dalam implementasi program identitas kependudukan digital (IKD) masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Analisis dilakukan menggunakan tiga dimensi komunikasi kebijakan Edwards III, yaitu transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

A. Transmisi Informasi

Dimensi transmisi dalam model implementasi kebijakan Edwards III, 1980 (dalam Jumroh & Pratama, 2021) menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana pesan kebijakan disampaikan secara tepat, merata, dan berkelanjutan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana serta kelompok sasaran.

Transmisi informasi yang tidak efektif berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, transmisi informasi dalam implementasi IKD di Kabupaten Sidrap masih menghadapi tantangan signifikan yang dapat dikategorikan dalam tiga aspek utama:

1. Saluran Komunikasi dan Jangkauan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Sidrap telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dalam menyosialisasikan kebijakan IKD. Kepala Disdukcapil, menyatakan “Media yang digunakan dalam sosialisasi mencakup baliho yang dipasang di kantor Disdukcapil, serta *platform* media sosial seperti Facebook dan Instagram yang dirancang untuk menjangkau masyarakat lebih luas (Kadis Dukcapil, komunikasi pribadi, 27 Desember 2024).”

Secara normatif, penggunaan berbagai media tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi komunikasi kebijakan dengan perkembangan teknologi informasi. Namun, jika dianalisis menggunakan konsep transmisi Edwards III, keberagaman saluran komunikasi belum tentu menjamin efektivitas transmisi kebijakan apabila tidak mempertimbangkan karakteristik sosial dan geografis kelompok sasaran ([Jumroh & Pratama, 2021](#)). Fokus transmisi yang dominan pada media digital berpotensi menciptakan ketimpangan informasi, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses internet dan literasi digital.

Kondisi ini tercermin dari pernyataan salah satu informan masyarakat yang berasal dari Desa Takkalasi yang menyatakan bahwa “Di wilayah saya, sosialisasi belum pernah dilakukan. Saya rasa hal ini perlu dilakukan agar masyarakat di daerah saya juga dapat memahami manfaat dan cara kerja identitas kependudukan digital dengan baik (Informan NK, komunikasi pribadi, 28 Desember 2024).”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa informasi kebijakan belum sepenuhnya ditransmisikan hingga ke tingkat masyarakat desa. Dalam perspektif implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan lemahnya jangkauan transmisi yang terjadi ketika pesan kebijakan tidak sampai secara langsung kepada kelompok sasaran utama sebagaimana yang diharapkan.

Temuan serupa juga diungkapkan oleh salah satu informan yang berasal dari Desa Lombo yang mengatakan:

Sosialisasi langsung terkait identitas kependudukan digital di wilayah saya belum pernah dilakukan. Bagi masyarakat yang tinggal di desa terpencil seperti di tempat saya, Desa Lombo, sosialisasi langsung tetap sangat diperlukan agar informasi dapat menjangkau semua kalangan, termasuk mereka yang tidak aktif di media sosial (Informan SS, komunikasi pribadi, 28 Desember 2024).

Pernyataan ini memperkuat indikasi bahwa penggunaan media sosial dan baliho belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Sosialisasi tatap muka masih dipandang sebagai saluran komunikasi yang relevan dan efektif untuk memastikan pemahaman kebijakan, khususnya bagi masyarakat yang tidak aktif di media digital. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan [Sarifuddin & Mahmud \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik berbasis digital seringkali menghadapi kendala transmisi informasi di wilayah pedesaan apabila tidak diimbangi dengan pendekatan komunikasi langsung dan pendampingan berkelanjutan. Menurut Ripley dan Franklin (dalam [Mulyadi, 2016](#)) menegaskan bahwa kegagalan transmisi informasi kepada kelompok sasaran merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kinerja implementasi kebijakan publik.

Dengan demikian, transmisi informasi kebijakan IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang masih memerlukan penguatan strategi komunikasi yang lebih adaptif, terutama melalui kombinasi antara media digital dan sosialisasi langsung di tingkat desa. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa informasi kebijakan tidak hanya disampaikan, tetapi juga benar-benar diterima dan dipahami oleh seluruh kelompok sasaran secara merata.

2. Metode Sosialisasi

Metode sosialisasi merupakan bagian penting dalam dimensi transmisi informasi pada model implementasi kebijakan Edwards III. Edwards III menegaskan bahwa transmisi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga menyangkut perencanaan metode komunikasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, metode sosialisasi kebijakan IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang belum dilaksanakan secara sistematis dan khusus.

Kepala Disdukcapil menjelaskan bahwa sosialisasi lebih bersifat "mengikut" pada kegiatan-kegiatan lain seperti yang dinyatakan berikut ini: "Sosialisasi program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai momen yang tersedia. Mengingat keterbatasan anggaran, pihak Disdukcapil tidak memiliki program sosialisasi khusus yang terpisah (Kadis Dukcapil, komunikasi pribadi, 27 Desember 2024)."

Kepala Disdukcapil Kabupaten Sidrap juga menjelaskan bahwa sosialisasi IKD tidak memiliki program tersendiri, melainkan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kegiatan yang sudah ada. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang memengaruhi tidak adanya perencanaan sosialisasi IKD secara khusus. Dalam konteks implementasi kebijakan, kondisi ini mencerminkan lemahnya desain metode transmisi informasi karena sosialisasi tidak dirancang sebagai agenda strategis yang berfokus pada pencapaian tujuan kebijakan IKD.

Pernyataan ini diperkuat oleh pegawai Disdukcapil yang menyatakan:

Sosialisasi program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan di beberapa kecamatan, terutama saat momen reses anggota dewan. Biasanya, sosialisasi Identitas Kependudukan Digital memanfaatkan kegiatan sosialisasi lain yang sedang berlangsung. Namun, hingga saat ini, belum ada program sosialisasi khusus yang secara eksklusif ditujukan untuk Identitas Kependudukan Digital (Pegawai Disdukcapil, komunikasi pribadi, 26 Desember 2024)."

Pola sosialisasi yang bersifat "mengikut" ini mengindikasikan bahwa penyampaian informasi kebijakan IKD belum menjadi prioritas utama, melainkan hanya sebagai informasi tambahan dalam kegiatan lain. Jika dianalisis menggunakan konsep transmisi Edwards III tahun 1980, pendekatan semacam ini berpotensi menyebabkan distorsi pesan kebijakan, karena informasi IKD tidak disampaikan secara mendalam dan fokus kepada kelompok sasaran.

Pendekatan sosialisasi yang tidak terencana secara khusus berdampak pada ketidakmerataan jangkauan informasi kebijakan. Sosialisasi yang bergantung pada momen tertentu menyebabkan hanya wilayah atau kelompok masyarakat tertentu yang memperoleh informasi, sementara wilayah lainnya belum tersentuh secara

optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transmisi informasi belum berlangsung secara sistematis dan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [Zharfan & Centia \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa kebijakan pelayanan publik berbasis digital sering kali tidak berjalan optimal ketika sosialisasi hanya dilakukan secara insidental dan tidak memiliki program khusus yang terencana. Penelitian [Sugianto et al. \(2025\)](#) juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran kerap dijadikan alasan tidak optimalnya sosialisasi kebijakan, namun tanpa strategi alternatif yang tepat, kondisi tersebut justru memperlemah efektivitas implementasi kebijakan di tingkat masyarakat.

Dengan demikian, metode sosialisasi kebijakan IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang masih memerlukan penguatan melalui perencanaan program sosialisasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Meskipun keterbatasan anggaran menjadi kendala, pemerintah daerah perlu merancang strategi sosialisasi alternatif yang lebih fokus dan merata agar transmisi informasi kebijakan IKD dapat menjangkau seluruh masyarakat secara efektif.

3. Ketergantungan pada Inisiatif Masyarakat

Transmisi informasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat bergantung pada inisiatif masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan: "Pihak Disdukcapil juga telah menyampaikan kepada kepala desa dan kelurahan bahwa jika pemerintah mampu mengumpulkan minimal 100 orang, tim dari Disdukcapil siap turun langsung ke lokasi untuk melakukan sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Kadis Dukcapil, komunikasi pribadi, 27 Desember 2024)."

Kebijakan ini, meskipun dimaksudkan sebagai bentuk "jemput bola", secara tidak langsung mengalihkan tanggung jawab pengorganisasian sosialisasi kepada masyarakat. Hasilnya, hanya daerah dengan masyarakat yang proaktif yang mendapatkan akses ke informasi dan layanan IKD secara memadai.

Jika dianalisis lebih mendalam, pola ini mencerminkan lemahnya peran pemerintah sebagai aktor utama dalam transmisi kebijakan. Edwards III menekankan bahwa tanggung jawab utama penyampaian informasi kebijakan berada pada pelaksana kebijakan, bukan pada kelompok sasaran. Ketika pengorganisasian

sosialisasi justru dialihkan kepada masyarakat maka transmisi informasi berpotensi menjadi tidak merata dan tidak sistematis.

Kebijakan yang mensyaratkan jumlah minimal peserta sosialisasi secara tidak langsung menggeser beban komunikasi kebijakan kepada masyarakat. Akibatnya, hanya wilayah dengan masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi dan kesadaran tinggi yang memperoleh akses terhadap informasi dan layanan IKD secara memadai. Sementara itu, wilayah dengan keterbatasan sumber daya sosial, kepemimpinan lokal yang lemah, atau rendahnya literasi digital cenderung tertinggal dalam proses implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan jangkauan transmisi informasi antarwilayah di Kabupaten Sidrap.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Suwartini & Eprilianto (2025) yang menyatakan bahwa ketergantungan pada inisiatif masyarakat dalam sosialisasi kebijakan publik seringkali menimbulkan ketimpangan akses informasi, terutama di wilayah pedesaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan jemput bola dalam pelayanan publik berbasis digital akan efektif apabila disertai perencanaan sosialisasi yang proaktif dari pemerintah, bukan semata-mata bergantung pada permintaan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun upaya transmisi informasi kebijakan IKD telah dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang, mekanisme sosialisasi yang bergantung pada inisiatif masyarakat menunjukkan bahwa transmisi informasi belum sepenuhnya berjalan efektif dan inklusif. Hal ini memperkuat pandangan Edwards III bahwa transmisi kebijakan yang berhasil membutuhkan saluran komunikasi yang tepat serta mekanisme penyebaran informasi yang dirancang secara aktif oleh pemerintah agar dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya transmisi informasi telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam jangkauan dan metode sosialisasi yang digunakan. Edwards III menekankan bahwa transmisi yang efektif membutuhkan saluran komunikasi yang tepat dan mekanisme penyebaran informasi yang mencapai seluruh kelompok sasaran, hal yang belum sepenuhnya tercapai dalam implementasi IKD di Kabupaten Sidrap.

B. Kejelasan Informasi

Dimensi kejelasan (*clarity*) merujuk pada sejauh mana isi kebijakan disampaikan secara jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Kejelasan informasi menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan, karena informasi yang tidak dipahami dengan baik berpotensi menimbulkan resistensi, kesalahan persepsi, dan rendahnya tingkat adopsi kebijakan.

Dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan merujuk pada sejauh mana informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Hasil wawancara mengungkap beberapa aspek penting terkait kejelasan informasi dalam implementasi IKD.

1. Pemahaman Manfaat IKD

Hasil wawancara dengan informan dari Disdukcapil menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman masyarakat menjadi tantangan utama dalam mengomunikasikan kebijakan IKD. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, menegaskan: "Kendala utama dalam mengkomunikasikan program ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya Identitas Kependudukan Digital, sehingga minat untuk menggunakan program ini masih rendah (Kabid Disdukcapil, komunikasi pribadi, 26 Desember 2024)."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pesan kebijakan yang disampaikan belum mampu menjelaskan secara konkret nilai tambah dan urgensi penggunaan IKD bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa substansi informasi kebijakan belum disampaikan secara sederhana dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi mengenai IKD cenderung dipersepsikan sebagai kebijakan administratif semata, bukan sebagai inovasi layanan yang memberikan kemudahan dan efisiensi. Akibatnya, masyarakat tidak melihat perbedaan yang signifikan antara KTP fisik dan IKD sehingga tidak terdorong untuk beralih ke layanan digital.

Hal senada juga disampaikan oleh pegawai Disdukcapil: "Kendala utama dalam mengkomunikasikan program ini adalah rendahnya minat masyarakat terhadap KTP digital. Banyak masyarakat yang masih merasa lebih nyaman

menggunakan KTP fisik, sehingga adopsi Identitas Kependudukan Digital berjalan lambat (Pegawai Disdukcapil, komunikasi pribadi, 26 Desember 2024)."

Preferensi terhadap KTP fisik ini tidak hanya menunjukkan faktor kebiasaan, tetapi juga mengindikasikan kurangnya kejelasan informasi mengenai keamanan, kepraktisan, serta manfaat jangka panjang IKD. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman (*information gap*) antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Suwartini & Eprilianto (2025) yang menyatakan bahwa rendahnya adopsi layanan administrasi kependudukan berbasis digital umumnya disebabkan oleh kurang jelasnya komunikasi mengenai manfaat kebijakan kepada masyarakat. Penelitian [Aryani et al. \(2025\)](#) juga menemukan bahwa masyarakat cenderung mempertahankan layanan konvensional ketika informasi kebijakan digital tidak disertai penjelasan yang konkret, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan mereka.

2. Kualitas Konten Informasi

Kualitas konten informasi merupakan unsur penting dalam dimensi kejelasan komunikasi kebijakan menurut Edwards III. Kejelasan tidak hanya ditentukan oleh kemudahan bahasa, tetapi juga oleh kelengkapan, kedalaman, dan relevansi informasi yang disampaikan kepada kelompok sasaran. Informasi kebijakan yang bersifat umum dan normatif cenderung sulit mendorong perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam konteks kebijakan berbasis digital seperti identitas kependudukan digital (IKD).

Meskipun beberapa informan menyatakan bahwa informasi yang mereka terima mudah dipahami, namun analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa konten informasi yang disampaikan masih bersifat umum dan tidak cukup detail untuk menjelaskan keunggulan IKD dibandingkan KTP elektronik. Kepala Dinas mencoba menjelaskan keunggulan IKD: "Program ini diharapkan dapat dimaksimalkan karena Identitas Kependudukan Digital merupakan bentuk digital dari KTP-el yang menawarkan banyak kelebihan. KTP elektronik, misalnya, dapat rusak atau hilang, sedangkan Identitas Kependudukan Digital tersimpan di ponsel yang hampir selalu dibawa oleh pemiliknya. Hal ini membuat Identitas Kependudukan Digital menjadi solusi yang lebih praktis dan aman (Kadis Dukcapil Sidrap, komunikasi pribadi, 27 Desember 2024)."

Meskipun penjelasan tersebut secara konseptual menggambarkan keunggulan IKD, dalam perspektif kejelasan Edwards III, informasi tersebut belum cukup operasional dan kontekstual bagi masyarakat. Penekanan pada aspek “praktis” dan “aman” belum diikuti dengan penjelasan konkret mengenai situasi nyata bahwa IKD dapat digunakan untuk mempermudah pelayanan publik, seperti akses layanan kesehatan, perbankan, atau administrasi pemerintahan lainnya. Akibatnya, masyarakat belum mampu mengaitkan manfaat IKD dengan kebutuhan administratif sehari-hari yang mereka hadapi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [Kairupan & Pangkey \(2024\)](#) yang menyatakan bahwa kebijakan layanan publik digital sering kali kurang diminati masyarakat karena informasi yang disampaikan tidak menjelaskan manfaatnya secara aplikatif. Penelitian [Putri et al. \(2025\)](#) juga menemukan bahwa kejelasan konten informasi yang disertai contoh konkret penggunaan layanan digital berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan masyarakat.

Dengan demikian, kualitas konten informasi dalam implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penyampaian informasi yang lebih detail, kontekstual, dan berbasis contoh nyata. Penyajian konten yang menunjukkan secara langsung bagaimana IKD dapat memudahkan urusan administratif sehari-hari diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan minat masyarakat untuk mengadopsi layanan IKD.

3. Kesenjangan Digital dan Pemahaman

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kejelasan informasi kebijakan IKD tidak hanya ditentukan oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi tersebut. Dalam perspektif Edwards III, kejelasan informasi akan sulit tercapai apabila kelompok sasaran memiliki keterbatasan akses terhadap saluran komunikasi yang digunakan oleh pelaksana kebijakan.

Hal ini tercermin dari pernyataan informan masyarakat dari Pangkajene yang mengungkapkan: "Di wilayah saya, tidak ada sosialisasi langsung mengenai program identitas kependudukan digital. Hal ini menjadi tantangan karena tidak semua masyarakat memiliki akses internet atau kemampuan untuk mencari informasi secara mandiri (Informan NAA, komunikasi pribadi, 28 Desember 2025)." 4.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang bersumber dari perbedaan tingkat literasi dan akses digital di tengah masyarakat. Bagi mereka yang memiliki akses internet dan terbiasa mencari informasi secara online, pemahaman tentang IKD mungkin lebih mudah diperoleh. Namun, bagi sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan, sosialisasi langsung tetap menjadi metode yang dibutuhkan untuk memastikan kejelasan informasi.

Jika dianalisis lebih lanjut, kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi komunikasi kebijakan IKD masih cenderung berorientasi pada masyarakat yang melek teknologi. Bagi kelompok masyarakat yang memiliki akses internet dan terbiasa menggunakan media digital, informasi mengenai IKD relatif lebih mudah diperoleh dan dipahami. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur digital serta rendahnya literasi teknologi, informasi kebijakan menjadi tidak jelas dan sulit dipahami tanpa adanya sosialisasi langsung.

Dalam kerangka kejelasan Edwards III, kesenjangan digital ini berimplikasi pada ketidakmerataan pemahaman kebijakan. Informasi yang secara substansi sudah tersedia tetap tidak efektif apabila tidak dapat diakses oleh seluruh kelompok sasaran. Dengan demikian, kejelasan informasi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan kapasitas penerima kebijakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [Suwartini & Eprilianto \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa kesenjangan literasi digital menjadi salah satu faktor utama rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pelayanan publik berbasis digital. Penelitian [Aryani et al. \(2025\)](#) juga menemukan bahwa ketergantungan pemerintah pada media digital tanpa diimbangi sosialisasi langsung cenderung memperlebar jurang pemahaman antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Dengan demikian, kesenjangan digital yang terjadi di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa kejelasan informasi kebijakan IKD belum sepenuhnya tercapai secara inklusif. Sosialisasi langsung masih menjadi kebutuhan penting, terutama bagi masyarakat pedesaan, agar informasi kebijakan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipahami secara merata oleh seluruh kelompok sasaran. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi IKD tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada strategi komunikasi kebijakan yang sensitif terhadap realitas sosial masyarakat.

Edwards III menegaskan bahwa kejelasan informasi merupakan komponen krusial dalam komunikasi kebijakan yang efektif, karena informasi yang ambigu atau tidak kontekstual akan menghambat pemahaman dan penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran. Dalam konteks implementasi identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang, temuan penelitian menunjukkan bahwa kejelasan informasi masih perlu diperkuat melalui penyusunan konten yang lebih komprehensif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan administratif masyarakat sehari-hari.

C. Konsistensi Informasi

Konsistensi dalam model komunikasi kebijakan Edwards III merujuk pada keselarasan dan keseragaman pesan kebijakan yang disampaikan oleh berbagai aktor implementasi, baik pembuat kebijakan, pelaksana di tingkat organisasi, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Konsistensi informasi menjadi penting karena perbedaan atau perubahan pesan kebijakan dapat menimbulkan kebingungan, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil wawancara mengungkap beberapa isu terkait konsistensi informasi:

1. Variasi Sumber Informasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi tentang IKD yang diterima masyarakat berasal dari berbagai sumber yang tidak selalu terkoordinasi. Salah satu masyarakat dari Kelurahan Benteng menyatakan: "Di wilayah saya, sosialisasi pernah dilakukan oleh mahasiswa PKM-PM dari Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sosialisasi ini sangat membantu masyarakat untuk memahami program Identitas Kependudukan Digital. Sayangnya, belum pernah ada sosialisasi langsung dari pihak Disdukcapil di wilayah saya (Informan M, komunikasi pribadi, 28 Desember 2024)."

Meskipun kegiatan tersebut dinilai membantu masyarakat dalam memahami IKD, kondisi ini menunjukkan bahwa peran Disdukcapil sebagai aktor utama komunikasi kebijakan belum sepenuhnya dominan di tingkat masyarakat. Dalam konteks konsistensi informasi, keterlibatan pihak eksternal tanpa koordinasi yang kuat berpotensi menimbulkan perbedaan penekanan pesan kebijakan.

Sementara itu, informan NK dari Desa Takkalasi dan informan NAA dari Pangkajenne memperoleh informasi mengenai IKD melalui sumber yang berbeda, seperti baliho dan internet. Perbedaan sumber informasi ini mengindikasikan bahwa masyarakat menerima pesan kebijakan melalui media yang memiliki tingkat kedalaman informasi yang beragam. Baliho cenderung menyajikan informasi singkat dan umum, sedangkan internet menyediakan informasi yang lebih luas namun tidak selalu terverifikasi atau dipahami secara utuh oleh masyarakat. Akibatnya, pesan kebijakan yang diterima masyarakat menjadi tidak seragam, baik dari segi isi, penekanan, maupun tingkat kejelasan.

Inkonsistensi informasi semacam ini dapat melemahkan efektivitas implementasi kebijakan karena masyarakat membangun pemahaman berdasarkan potongan informasi yang berbeda-beda. Ketika tidak ada narasi kebijakan yang seragam dari pelaksana utama, masyarakat berpotensi mengalami kebingungan dalam memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme kebijakan IKD.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [Lestari et al. \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa variasi sumber informasi kebijakan tanpa koordinasi yang jelas sering kali menimbulkan inkonsistensi pesan dan perbedaan pemahaman di tingkat masyarakat. Penelitian [Bella & Widodo \(2023\)](#) juga menemukan bahwa keterlibatan aktor non-pemerintah dalam sosialisasi kebijakan publik perlu diimbangi dengan panduan pesan yang baku agar tidak terjadi distorsi informasi.

Dengan demikian, variasi sumber informasi mengenai IKD di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa konsistensi komunikasi kebijakan belum sepenuhnya terjaga. Meskipun informasi telah tersebar melalui berbagai saluran, ketiadaan koordinasi pesan yang terpusat berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan IKD secara optimal.

2. Inkonsistensi Materi Sosialisasi

Konsistensi informasi dalam komunikasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kesamaan sumber informasi, tetapi juga oleh adanya pedoman atau standar materi sosialisasi yang digunakan oleh seluruh pelaksana kebijakan. Dalam model implementasi kebijakan Edwards III (1980), ketiadaan pedoman komunikasi yang baku berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran kebijakan di tingkat pelaksana,

yang pada akhirnya berdampak pada inkonsistensi pesan yang diterima oleh masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pedoman standar materi sosialisasi khusus untuk kebijakan IKD di Kabupaten Sidrap. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, menyebutkan: "Pihak Disdukcapil mengirimkan surat ke desa-desa dan kadang memanggil beberapa perwakilan dari kecamatan untuk mengikuti sosialisasi, untuk sosialisasi khusus belum ada (Kabid Disdukcapil, komunikasi pribadi, 26 Desember 2025)."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dilakukan secara *ad hoc*, tanpa adanya materi standar yang memastikan konsistensi pesan. Akibatnya, informasi yang diterima masyarakat bisa bervariasi tergantung pada siapa yang melakukan sosialisasi dan bagaimana mereka memahami program IKD.

Dalam perspektif Edwards III, pola sosialisasi yang tidak didukung oleh materi standar berpotensi menimbulkan perbedaan penekanan pesan antarpelaksana. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat sangat bergantung pada pemahaman individu yang melakukan sosialisasi, sehingga pesan kebijakan IKD dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi ini melemahkan konsistensi komunikasi kebijakan dan berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme penggunaan IKD.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [Putri et al. \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa ketiadaan pedoman komunikasi kebijakan yang baku sering kali menyebabkan distorsi pesan dalam proses sosialisasi kebijakan publik. Penelitian [Suwartini & Eprilianto \(2025\)](#) juga menemukan bahwa materi sosialisasi yang tidak terstandarisasi menjadi salah satu faktor utama terjadinya inkonsistensi informasi, khususnya dalam implementasi kebijakan berbasis digital.

Dengan demikian, inkonsistensi materi sosialisasi IKD di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa dimensi konsistensi informasi belum terpenuhi secara optimal. Penyusunan pedoman dan materi sosialisasi yang standar dan terstruktur menjadi kebutuhan mendesak agar pesan kebijakan IKD dapat disampaikan secara seragam, jelas, dan konsisten oleh seluruh pelaksana kebijakan, sehingga mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara menyeluruh.

3. Ketidakselarasan antara Kebijakan dan Implementasi

Aspek lain dari inkonsistensi informasi dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidrap terlihat pada ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan praktik implementasi di tingkat lokal. Dalam model implementasi kebijakan Edwards III, konsistensi tidak hanya berkaitan dengan keseragaman pesan antarpelaksana, tetapi juga dengan kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Aspek lain dari inkonsistensi terlihat dalam kesenjangan antara kebijakan nasional tentang IKD dan implementasinya di tingkat lokal. Kepala Dinas mengungkapkan: "Kendala utama dalam pelaksanaan sosialisasi adalah rendahnya adopsi Identitas Kependudukan Digital oleh pihak-pihak yang membutuhkan KTP, seperti perbankan. Banyak instansi masih mengandalkan KTP elektronik, sehingga masyarakat kurang termotivasi untuk beralih ke identitas kependudukan digital (Kadis Dukcapil, komunikasi pribadi, 27 Desember 2024)."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara nasional pemerintah mendorong penggunaan IKD sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan, pada praktiknya banyak institusi yang masih mengandalkan KTP elektronik sebagai dokumen utama. Kondisi ini menciptakan ketidaksinkronan antara pesan kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat dan pengalaman nyata yang mereka hadapi dalam mengakses layanan publik.

Dalam perspektif Edwards III, inkonsistensi antara kebijakan dan implementasi ini berpotensi melemahkan kredibilitas komunikasi kebijakan. Ketika masyarakat didorong untuk menggunakan IKD, tetapi institusi pelayanan belum sepenuhnya mengakui atau memanfaatkan IKD, maka pesan kebijakan menjadi kontradiktif. Akibatnya, masyarakat mengalami kebingungan dan cenderung mempertanyakan urgensi beralih ke IKD karena manfaat praktis yang dijanjikan belum dirasakan secara langsung.

Temuan ini menunjukkan bahwa inkonsistensi informasi tidak hanya bersumber dari pelaksana sosialisasi, tetapi juga dari belum terbangunnya ekosistem pendukung kebijakan IKD secara menyeluruh. Tanpa adanya keselarasan antarinstansi, pesan kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat menjadi tidak konsisten, sehingga motivasi masyarakat untuk mengadopsi IKD menjadi rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan [Sugianto et al. \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa kegagalan sinkronisasi kebijakan pusat dengan kesiapan institusi pengguna layanan di daerah sering kali menyebabkan rendahnya tingkat adopsi kebijakan digital. Penelitian [Krishna et al. \(2025\)](#) juga menemukan bahwa inkonsistensi antarinstansi dalam menerima dokumen digital menjadi faktor utama rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap inovasi pelayanan publik.

Dengan demikian, ketidakselarasan antara kebijakan nasional IKD dan implementasinya di tingkat lokal menunjukkan bahwa dimensi konsistensi informasi dalam komunikasi kebijakan IKD di Kabupaten Sidrap belum terpenuhi secara optimal. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kebingungan di masyarakat, tetapi juga mengurangi motivasi untuk mengadopsi IKD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan penyelarasan kebijakan antarinstansi agar pesan kebijakan IKD dapat disampaikan dan diterapkan secara konsisten di seluruh level implementasi.

Edwards III menegaskan bahwa konsistensi informasi merupakan elemen kunci dalam komunikasi kebijakan, karena pesan yang tidak selaras berpotensi menimbulkan kebingungan, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks IKD di Kabupaten Sidrap, temuan penelitian menunjukkan bahwa konsistensi pesan masih perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih terintegrasi antaraktor implementasi, penyusunan pedoman sosialisasi yang baku, serta penyelarasan kebijakan antarinstansi pengguna layanan. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa pesan kebijakan IKD disampaikan secara seragam melalui berbagai saluran komunikasi dan dipraktikkan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga mampu mendorong peningkatan pemahaman dan adopsi IKD di masyarakat.

Strategi Optimalisasi Komunikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis komprehensif terhadap tiga dimensi komunikasi kebijakan di atas, berikut dirumuskan strategi optimalisasi komunikasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang.

A. Strategi Optimalisasi Transmisi Informasi

Untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi mengenai IKD, diperlukan pengembangan program sosialisasi yang terjadwal dan berkelanjutan. Program ini harus berdiri sendiri, bukan sekadar pelengkap dalam kegiatan lain sehingga pesan yang disampaikan lebih fokus dan mendalam. Selain itu, pengalokasian anggaran khusus perlu diprioritaskan guna memastikan kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara berkala dan merata di seluruh wilayah.

Peningkatan efektivitas sosialisasi IKD menuntut program yang terjadwal, berkelanjutan, dan berdiri mandiri dengan dukungan anggaran khusus agar pelaksanaannya konsisten dan merata. Penyebaran informasi perlu diperkuat melalui diversifikasi saluran komunikasi dengan memadukan media sosial, media cetak, radio lokal, serta pertemuan tatap muka, disertai pengembangan konten digital yang menarik dan mudah dibagikan. Selain itu, penerapan segmentasi audiens menjadi kunci agar pesan sosialisasi relevan dengan karakteristik masyarakat urban, semi-urban, dan pedesaan, sehingga informasi IKD lebih efektif dipahami dan diterima.

B. Strategi Optimalisasi Kejelasan Informasi

Agar informasi tentang IKD lebih mudah dipahami oleh masyarakat, penyederhanaan pesan komunikasi menjadi langkah utama. Penggunaan bahasa yang sederhana dan tidak teknis akan memudahkan masyarakat memahami konsep serta manfaat dari IKD. Selain itu, pengembangan infografis dan visual yang informatif dapat membantu menjelaskan prosedur aktivasi serta keunggulan IKD dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.

Materi komunikasi IKD perlu difokuskan pada manfaat nyata yang langsung dirasakan masyarakat, bukan sekadar prosedur teknis, dengan menampilkan kemudahan IKD dalam berbagai urusan administrasi melalui studi kasus dan contoh konkret. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan menjadi langkah strategis, khususnya bagi kelompok yang kurang akrab dengan teknologi digital, melalui panduan aktivasi dan penggunaan IKD secara bertahap, baik dalam bentuk modul digital maupun pendampingan tatap muka di tingkat desa atau kecamatan.

C. Strategi Optimalisasi Konsistensi Informasi

Untuk menjamin keseragaman informasi IKD, diperlukan standar materi sosialisasi yang digunakan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait, disertai panduan komunikasi berisi pesan utama, FAQ, dan poin kunci. Konsistensi ini harus diperkuat

melalui koordinasi antarinstansi yang sistematis antara Disdukcapil, pemerintah desa, dan instansi terkait. Selain itu, monitoring dan evaluasi komunikasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan umpan balik masyarakat guna meningkatkan efektivitas materi dan metode sosialisasi sesuai kebutuhan lapangan.

D. Strategi Khusus untuk Akselerasi Adopsi IKD

Percepatan adopsi IKD menuntut keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan melalui kerja sama strategis dengan sektor perbankan, lembaga keuangan, dan instansi pelayanan publik agar IKD diakui dan digunakan secara luas. Upaya ini perlu diperkuat dengan publikasi kisah sukses dan testimoni tokoh masyarakat atau *influencer* lokal untuk meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat. Selain itu, kemudahan akses layanan teknis melalui *hotline*, pusat bantuan di tingkat desa atau kecamatan, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti pojok digital menjadi kunci untuk menghilangkan hambatan aktivasi dan penggunaan IKD.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi kendala utama dalam aspek komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi informasi belum merata, terutama di wilayah pedesaan. Kejelasan informasi masih rendah akibat kurangnya penyesuaian materi sosialisasi dengan tingkat literasi digital masyarakat. Konsistensi informasi juga bermasalah karena tidak adanya standar materi sosialisasi yang seragam dan perbedaan implementasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

Rekomendasi utama adalah memperkuat strategi komunikasi dengan memperluas jangkauan transmisi informasi melalui berbagai media, menyederhanakan bahasa dalam materi sosialisasi, serta memastikan koordinasi antarinstansi untuk menjaga keseragaman informasi. Pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih inklusif, memerhatikan kondisi sosial dan geografis, serta menyelaraskan regulasi IKD dengan kebijakan nasional agar diterima luas oleh masyarakat dan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhasni, R. A., Mamonto, F. H., & Onibala, N. M. (2024). *Kebijakan Publik*. Tahta Media Group.
- Amrih, Sinrang, A., & Erfina. (2024). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan melalui Transformasi Digital di Kantor Kecamatan Kulo. *Al Qisthi : Jurnal Sosial Dan Politik*, 14(2), 128–138.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4692092>
- Aryani, W. N., Artika, A. I., & Firdaus, A. B. (2025). Digitalisasi dan Pembangunan Sosial : Perspektif Sosiologi terhadap Transformasi Masyarakat di Era Teknologi. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, November.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1306>
- Bado, B. (2021). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. In *Pengantar Metode Kualitatif*. Tahta Media Group.
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31.
<https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>
- Kaendung, E., Pangemanan, F., Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. *Jurnal Governance*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35372/33103>
- Fauzan, A. (2024). Model Model Implementasi Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AModel>
- Illahi, A. K., Wardasari, N., Fitrahyati, Y., Illahi, A. K., Wardasari, N., & Fitrahyati, Y. (2025). From Traditional to Digital Media : Sources of Information and Resistance Behavior of COVID-19 Vaccination. *Jurnal Komunikasi*, 19(2).
<https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss2.art11>
- Jumroh, & Pratama, M. Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Paktik* (S. J. Insani (ed.); I). Insan Cendekia Mandiri.
- Kairupan, S. B., & Pangkey, I. (2024). Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan [JAK2P]*, 1886,

- 185–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jak2p.v5i2.68403>
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. *Kementerian Dalam Negeri RI*, 1–32.
- Krishna, I. A., Sagita, N. I., & Centia, S. (2025). Penerapan E-Government dalam Layanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Ampel Kota Surabaya. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 464–474. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.63955>
- Lestari, Y. D., Nugraha, J. T & Fauziah, N. M. (2019). Pengembangan E-Government melalui Layanan Aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*. <https://doi.org/10.31113/JIA.v16i2.230>.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Az, S., & Kania, Z. (2025). Implementasi Kebijakan Publik : Pengertian , Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 69–73. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.320>
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nastia, N. (2024). Transformasi Digital Melalui Inovasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Governance*, 12(2), 268–281. <https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9799>
- Nuraeni, N., & Syahrudin, D. (2024). Efektivitas Pelayanan Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. *Karimah Tauhid*, 3(11), 12653–12661. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i11.15345>
- Permadi, K. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration*, 4(2). <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Posangi, H. A., Lengkong, F. D. J., & Dengo, S. (2022). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan

- dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *E-Journal UNSRAT*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/29824>
- Putri, D., Amanda, M., Said, M. M., & Abidin, A. Z. (2025). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 19(6), 10–21.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/27949/21191>
- Rahmawati, L., Arlan, A. S., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(1), 25–30.
<https://ejournal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/223>
- Rimardi, A. P., Bkti, H., & Halimah, M. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four-in-One) Kendaraan Roda Empat Di Kawasan Pasteur, Kota Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 251. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28677>
- Salopah, Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4761–4775.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12926>
- Sarifuddin, R., & Mahmud, S. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam Penanganan Tunawisma dan Pengemis Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 Implementation of Palu City Government Policy in Addressing Homelessness and Begging Based on Regional Regulation Number 3 of 2018 tun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4, 785–801.
<https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jipik/indek>
- Sinthawati, L., & Pradana, G. W. (2021). Kajian Aplikasi E-Government Dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kecamatan Semampir). *Publika: Kajian Aplikasi E-Government*, 563–572.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/62239>
- Sitti Rahmatyah, & Elsa, T. (2024). Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. *Journal Of Social Science Research*, 4, 8967–8977. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Sugianto, W., Mustofah, A., & Haryati, E. (2025). Transformasi Digital dalam Pelayanan

- Publik : Analisis Tantangan dan Strategi Inovasi Pelayanan Pencatatan Sipil di Era Digitalisasi. *Jurnal Humaniora*, November. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1272>
- Suwartini, T., & Eprilianto, D. F. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 5. <https://www.terbitan.sasanti.or.id/index.php/jda/article/download/163/146>
- Syafitri, I., Annisa, N., Resti, M., & Riau, U. I. (2025). Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) : Studi Kesiapan SDM dalam Era Transformasi Digital di Provinsi Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 277–301. <https://doi.org/10.25299/jiap.2025.24856>
- Zharfan, S. Z., & Centia, S. (2025). Perencanaan Komunikasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Konten Media Sosial Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7, 240–253. <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/download/61240/24804>